

## Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 – 2022

**Dheandra Merza Hanifah**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Email: [dheandra19001@mail.unpad.ac.id](mailto:dheandra19001@mail.unpad.ac.id)

**Ivan Yudianto**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Email: [ivan.yudianto@unpad.ac.id](mailto:ivan.yudianto@unpad.ac.id)

**Abstract.** *This research shows that the financial performance achievements of the Bekasi city government have not been maximized in realizing development for the welfare of the community. The method used is descriptive quantitative. Data collection techniques in this study include interviews, documentation, and literature studies. The results of the research show that the financial performance achievements of the Bekasi city government for the 2018 - 2022 fiscal year average DDF of 42.2% with a medium financial capacity category, average Regional Financial Independence of 77% with a delegation relationship pattern, average effectiveness of PAD is less effective with a ratio of 89.73%, an average operating expenditure of 80%, an average capital expenditure of 18%. Spending efficiency with an average of 84.75% in the efficient category. This shows that the average achievement is that the Bekasi City Government towards central government transfer funds is still more dominant than regional original income because the Bekasi City is still decentralized and most of the funds owned by the Bekasi City Government are prioritized for operating expenditures so that capital expenditures are relatively small and more to routine expenses or spending to fulfill activities. The Bekasi City Government has also focused on economic recovery during the COVID-19 pandemic, and overall performance achievements in Key Performance Indicators have been quite good.*

**Keywords:** *Regional Financial Performance, Government Financial Budget Realization Performance, APBD, Regional Financial Ratio Analysis*

**Abstrak.** Penelitian ini menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan pemerintah kota Bekasi belum maksimal dalam mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan pemerintah kota Bekasi tahun anggaran 2018 - 2022 rata-rata DDF sebesar 42,2% dengan kategori kemampuan keuangan sedang, Kemandirian Keuangan Daerah rata-rata sebesar 77% dengan pola hubungan delegasi, efektifitas PAD rata-rata kurang efektif dengan rasio 89,73%, belanja operasi rata-rata 80%, belanja modal rata-rata 18%. Efisiensi belanja dengan rata-rata 84,75% dengan kategori efisien. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata capaian Pemerintah Kota Bekasi terhadap dana transfer pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan pendapatan asli daerah karena Kota Bekasi masih bersifat desentralisasi dan sebagian besar dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi diprioritaskan untuk belanja operasi sehingga belanja modal relatif kecil dan lebih kepada belanja rutin atau belanja untuk pemenuhan kegiatan. Pemerintah Kota Bekasi juga fokus pada pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19, dan secara keseluruhan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama sudah cukup baik.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah, APBD, Analisis Rasio Keuangan Daerah

## LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola keuangan publik dan memastikan keberlangsungan pembangunan. Pemerintah berusaha menyelenggarakan pemerintahan yang baik atau *good governance* dengan terus melakukan perkembangan secara intensif di berbagai bidang, hal ini didukung perkembangan ilmu dan teknologi yang cukup pesat. Kota Bekasi sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Kota Bekasi tentunya memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan memiliki pertanggungjawaban hingga suatu anggaran dapat dipublikasikan ke publik untuk didiskusikan atau bahkan dikritik.

Pentingnya pandangan masyarakat sebagai tolok ukur utama dalam pemerintahan desentralisasi dapat dilihat dari prinsip otonomi daerah yang menekankan pentingnya menjalankan pemerintahan berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat, bukan semata-mata berdasarkan keputusan dari pemerintah pusat, dengan demikian, hal ini akan memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Namun, selama pelaksanaan pemerintahan otonomi, banyak kendala yang dihadapi. Pada perjalanan tersebut, terjadi banyak kasus korupsi yang melibatkan beberapa individu dari kalangan pejabat pemerintah daerah. Mereka memanfaatkan celah dan kelemahan dalam sistem desentralisasi untuk keuntungan pribadi, mengakibatkan gangguan dalam jalannya pemerintahan yang berorientasi pada otonomi (Winoto & Falikhatun, 2015).

**Tabel 1 Kontribusi PAD terhadap TPD Kota Bekasi Tahun 2018 – 2022**

Tahun	TPD	PAD	Kontribusi PAD terhadap TPD
2018	4.835.980.257.174	2.001.150.459.494	41%
2019	5.963.932.792.508	2.442.151.873.746	41%
2020	5.092.165.753.501	2.048.909.314.820	40%
2021	5.767.654.700.558	2.536.707.290.387	44%
2022	5.862.702.649.409	2.598.632.223.398	44%

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Bekasi (diolah, 2023)*

Keberhasilan pemerintah daerah dapat terlihat dari pelayanan yang diberikan dan efisiensi anggaran yang dimiliki, maka dari itu pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Menurut Putra (2017), tujuan dari desentralisasi fiskal adalah mengurangi kesenjangan dalam hal keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta di antara daerah-daerah itu sendiri, meningkatkan pemanfaatan sumber daya keuangan agar efektif juga efisien,.

Penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memerlukan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara mumpuni membutuhkan keterampilan yang memadai dari sumber daya manusia memiliki kualifikasi dan keahlian yang tinggi, agar dapat tercipta optimalisasi anggaran pemerintah daerah yang mengedepankan prinsip *value for money* yaitu efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Menurut Halim (2008), kemandirian keuangan daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk secara mandiri membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah mereka sendiri. Maka analisis kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bekasi perlu dilakukan sehingga dapat memberikan informasi apakah Pemerintah Kota Bekasi dalam memaksimalkan sumber-sumber PAD agar mampu memiliki keuangan yang mandiri untuk membiayai urusan rumah tangganya dan mengurangi pembiayaan aktivitas rumah tangganya yang bersumber dari pemerintah pusat atau provinsi. Indikasi masalah kedua merupakan fokus utama desentralisasi fiskal yaitu mengelola pendapatan secara maksimal. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal ini diharapkan terjadi pemerataan kemampuan keuangan antara daerah yang sejalan dengan tingkat kewenangan urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah otonom.

Beberapa penelitian mengenai kinerja keuangan daerah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian (Hartoyo & Arsad, 2021) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Dompu tahun 2015-2019 rasio desentralisasi yang rendah, kemandirian pola hubungan instruktif, rasio efektivitas di kategori efektif, rasio efisiensi dikategorikan kurangnya efisiensi, keserasian belanja dominan dengan belanja operasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Marliani, 2022) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Bandung tahun 2016-2020 telah melakukan efisiensi belanja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Harahap, 2020)

menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih bergantung kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan fenomena masalah tersebut dan dari penelitian terdahulu, maka penelitian diperlukan untuk memahami kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Bekasi. Pengukuran dengan analisis rasio, hasil analisis kinerja keuangan dapat mewujudkan value for money dan dapat dijadikan sebagai alat evaluasi bagi pemerintah kota Bekasi serta akan memberikan penilaian terhadap pengelolaan pemasukan dan pengeluaran anggaran belanja guna mewujudkan pembangunan dan mampu menciptakan kemandirian keuangan daerah secara efektif agar mampu meningkatkan meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bekasi tahun anggaran 2018 – 2022.

## **KAJIAN TEORITIS**

Definisi konseptual yang akan dikemukakan oleh penulis, dibuat agar terdapat batasan-batasan yang jelas antara definisi secara teoritis dan definisi secara konseptual yang berguna untuk memudahkan pembahasan oleh penulis. Menurut Mardiasmo (2006), pelaksanaan otonomi daerah memiliki dampak signifikan terhadap penyerahan dan perubahan dalam penyediaan dana, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam konteks desentralisasi fiskal.

Menurut Mardiasmo (2002), definisi *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomis merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Kinerja keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seringkali dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Menurut Mardiasmo (2012), tujuan penilaian terhadap kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Mampu memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam mencapai program yang mencakup seluruh satuan unit kerja sesuai dengan perencanaan yang diharapkan.
2. Sebagai dasar guna melakukan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan juga sebagai tolak ukur untuk pemerataan alokasi sumber daya.
3. Sebagai perwujudan pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan transparansi kepada masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan sebuah kerangka yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang menggunakan tahap penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian adalah lingkup Pemerintah Kota Bekasi. Objek penelitian dalam penelitian yang peneliti gunakan adalah kinerja keuangan daerah yang diambil dan diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bekasi tahun anggaran 2018 – 2022. Data penelitian ini bersumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan berasal dari hasil wawancara, sumber data sekunder yang digunakan berasal dari penelitian sebelumnya, LRA, dan literatur. Teknik Pengumpulan Data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Analisis kinerja keuangan dengan tolok ukur yang digunakan dalam teknik analisis ini data adalah: (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, yaitu mencerminkan pemberian wewenang dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dan mengelola pendapatan; (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), ialah mengindikasikan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat menggunakan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak dan retribusi, dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat atau pinjaman; (3) Rasio Efektivitas (PAD), merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai realisasi pendapatan asli daerah yang telah direncanakan, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi

sebenarnya dari daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas (PAD), maka semakin baik kinerja pemerintah daerah; (4) Rasio Pertumbuhan pendapatan dan belanja, yaitu memberikan informasi apakah kinerja keuangan pemerintah daerah dalam periode satu tahun anggaran atau beberapa periode tahun anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif atau negatif, kecenderungan (*trend*) penerimaan pendapatan daerah diharapkan meningkat dan pertumbuhannya positif; (5) Rasio Keserasian, ialah menggambarkan upaya pemerintah untuk mengalokasikan dana belanja operasi dan belanja modalnya secara baik. Menurut Halim (2012), ketika dana yang dialokasikan untuk belanja operasinya semakin besar, maka semakin kecil nilai belanja modal yang dipergunakan dalam sarana dan prasarana ekonomi untuk masyarakatnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

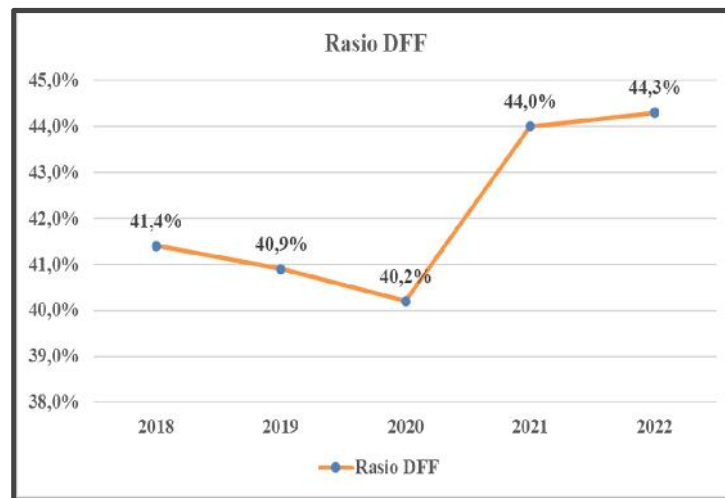
Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang berada di ujung barat bagian utara Provinsi Jawa Barat dan merupakan bagian dari kota-kota penyangga serta penyeimbang DKI Jakarta yaitu JABODETABEK. Secara geografis Kota Bekasi terletak di antara koordinat  $106^{\circ} 55'$  bujur timur dan  $6^{\circ} 7' - 6^{\circ} 15'$  lintang selatan. Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km<sup>2</sup>. Kota Bekasi juga dikenal dengan julukan Kota Patriot karena memiliki sejarah perjuangan sebagai pintu masuk.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) mampu memberikan gambaran mengenai seberapa besar capaian kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) pada Pemerintah Kota Bekasi. Tingkat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah.

**Tabel 2 Rasio DDF Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 – 2022**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi TPD (Rp)	Skala Rasio DDF (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
2018	2.001.150.459.494	4.835.980.257.174	41,4%	Sedang
2019	2.442.151.873.746	5.963.932.792.508	40,9%	Sedang
2020	2.048.909.314.820	5.092.165.753.501	40,2%	Sedang
2021	2.536.707.290.387	5.767.654.700.558	44,0%	Sedang
2022	2.598.632.223.398	5.862.702.649.409	44,3%	Sedang
<b>Rata-Rata</b>			<b>42,2%</b>	<b>Sedang</b>

Sumber: LRA, (data diolah, 2023).

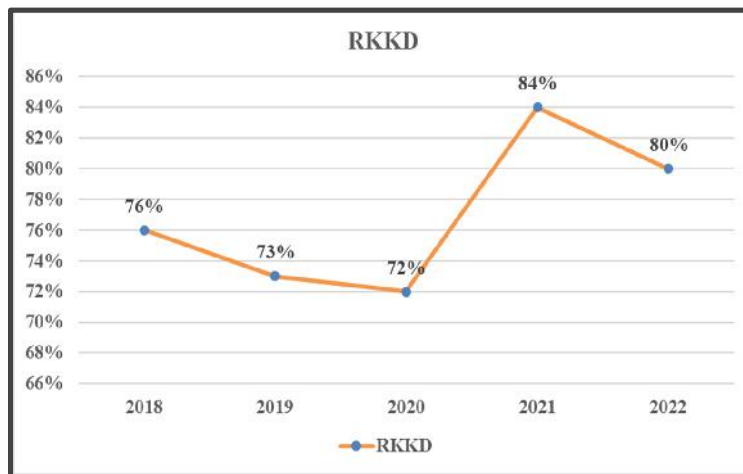
**Gambar 1 Grafik Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Tabel 2 dan gambar 1 menunjukkan bahwa sejak tahun anggaran 2018 – 2022, Pemerintah Kota Bekasi mengalami nilai rasio DDF yang fluktuasi atau naik dan turun, tahun 2020 menjadi tahun anggaran dimana rasio DDF yang terendah di Kota Bekasi selama 5 tahun dengan angka rasio sebesar 40,2%. Pada tahun-tahun anggaran berikutnya, terjadi kenaikan pada besaran rasio DDF di Kota Bekasi, pada tahun 2021 mengalami peningkatan paling tinggi dengan angka rasio DDF 44,0% dari tahun anggaran sebelumnya.

**Tabel 3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bekasi**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp)	Tingkat Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2018	2.001.150.459.494	2.645.358.572.147	76%	Delegatif
2019	2.442.151.873.746	3.329.109.212.222	73%	Partisipatif
2020	2.048.909.314.820	2.843.989.275.635	72%	Partisipatif
2021	2.536.707.290.387	3.021.521.560.171	84%	Delegatif
2022	2.598.632.223.398	3.264.070.426.011	80%	Delegatif
<b>Rata-Rata</b>			<b>77%</b>	<b>Delegatif</b>

Sumber: LRA Kota Bekasi (data diolah oleh penulis, 2023)

**Gambar 2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bekasi**

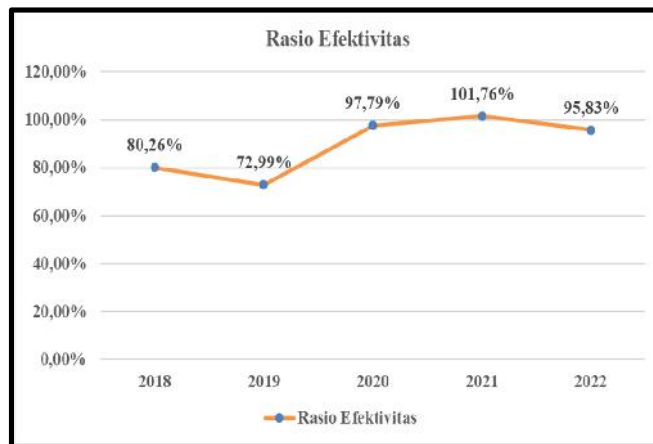
Berdasarkan tabel 3 dan gambar 2 diatas menunjukkan nilai rasio kemandirian dan kemampuan keuangannya pada Pemerintah Kota Bekasi tahun anggaran 2018 – 2022 berfluktuasi, yang dimana apabila angka pada rasio tersebut semakin tinggi dan mampu mendekati angka 100% artinya tingkat keuangan daerah terhadap bantuan dana dari pihak eksternal akan semakin rendah dan daerah dianggap mandiri secara keuangan guna membiayai segala aktivitas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik di daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah kota Bekasi sudah baik dalam ketergantungan dan mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.



**Tabel 4 Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kota Bekasi**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2018	2.001.150.459.494.00	2.493.212.141.337.00	80,26%	Kurang Efektif
2019	2.442.151.873.746.00	3.346.023.558.779.00	72,99%	Kurang Efektif
2020	2.048.909.314.820.00	2.095.144.151.883.00	97,79%	Cukup Efektif
2021	2.536.707.290.387.00	2.492.954.556.479.00	101,76%	Efektif
2022	2.598.632.223.398.00	2.711.748.499.927.00	95,83%	Cukup Efektif
<b>Rata-Rata</b>			<b>89.73%</b>	<b>Kurang Efektif</b>

Sumber: LRA APBD Kota Bekasi, diolah, 2023.

**Gambar 3 Rasio Efektivitas PAD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 - 2022**

Sumber: LRA APBD Kota Bekasi, diolah, 2023.

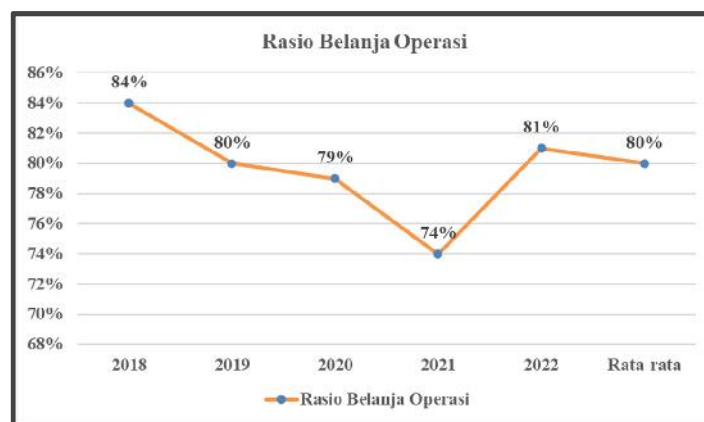
Tabel 4 dan gambar 3 memperlihatkan beragam capaian dari efektivitas PAD Kota Bekasi tahun anggaran 2018 – 2022. Persentase capaian efektivitas tertinggi yaitu pada tahun 2021 dengan angka 101,76%, sedangkan angka terendah pada tahun 2019 dengan persentase 72,99%. Berdasarkan gambar 4.6 efektivitas PAD Kota Bekasi pada tahun anggaran 2018 – 2022 secara keseluruhan menunjukkan fluktuasi dimana pada tahun 2019 mengalami penurunan, lalu pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan dan pada 2020 mengalami kenaikan kembali, secara angka efektivitas PAD Kota Bekasi sudah menunjukkan ketercapaian yang efektif karena mempunyai nilai 101,76%. Namun

secara keseluruhan rata-rata Kota Bekasi belum menunjukkan tercapaian yang efektif karena berada di bawah angka 100% atau dengan nilai 89,73%.

**Tabel 5 Perhitungan Rasio Belanja Operasi Pemerintah Kota Bekasi**

Tahun	Realisasi Total Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2018	5.000.442.687.914	4.219.475.858.337	84%
2019	5.566.376.729.279	4.461.255.631.781	80%
2020	4.785.811.812.190	3.777.484.224.403	79%
2021	5.704.885.462.982	4.204.029.599.061	74%
2022	5.718.816.481.557	4.623.563.102.587	81%
<b>Rata-Rata</b>	<b>5.355.266.634.784</b>	<b>4.257.161.683.233</b>	<b>80%</b>

Sumber: LRA APBD Kota Bekasi (data diolah, 2023).



**Gambar 4 Rasio Belanja Operasi Pemerintah Kota Bekasi**

Sumber: LRA APBD Kota Bekasi, diolah, 2023.

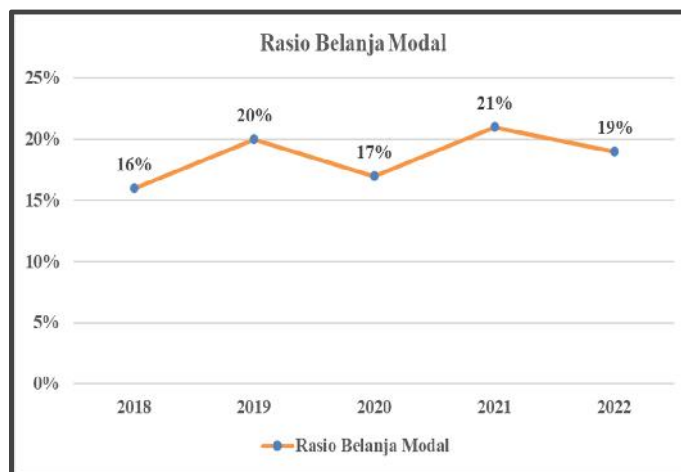
Tabel 5 dan gambar 4 menguraikan tentang rasio belanja modal tahun anggaran 2018 – 2022 yang mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Selama periode tersebut, secara keseluruhan proporsi belanja operasi rata-rata sebesar 80% dari jumlah total belanja daerah. Tahun anggaran 2018 rasio belanja operasi sebesar 84%, lalu pada tahun 2019 rasio belanja operasinya mengalami penurunan dengan sebesar 80%, pada tahun anggaran berikutnya angka rasio pada belanja operasi turun menjadi 79%, tahun anggaran berikutnya kembali terjadi penurunan proporsi belanja operasi menjadi 74%

yang merupakan capaian belanja operasi terendah pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 rasio belanja operasi mengalami peningkatan menjadi 81%.

**Tabel 6 Perhitungan Rasio Belanja Modal Pemerintah Kota Bekasi**

Tahun	Total Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2018	5.000.442.687.914	780.096.411.797	16%
2019	5.566.376.729.279	1.104.382.128.417	20%
2020	4.785.811.812.190	790.046.033.137	17%
2021	5.704.885.462.982	1.189.300.902.085	21%
2022	5.718.816.481.557	1.073.714.002.646	19%
<b>Rata-rata</b>	<b>5.355.266.634.784</b>	<b>987.507.895.616</b>	<b>18%</b>

Sumber: LRA APBD Kota Bekasi, diolah, 2023.



**Gambar 5 Rasio Belanja Modal Pemerintah Kota Bekasi**

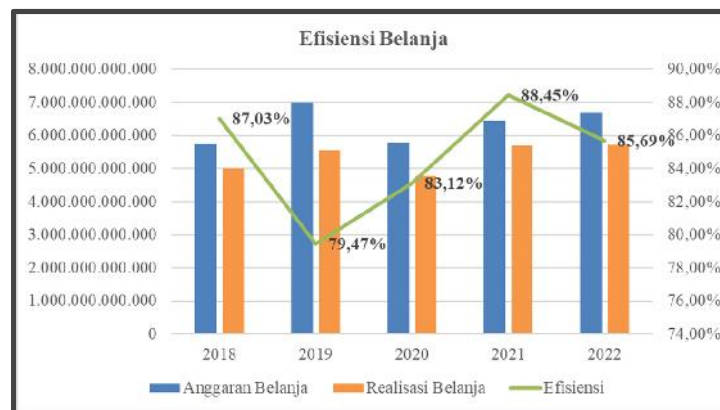
Sumber: LRA APBD Kota Bekasi, diolah, 2023.

Tabel 6 dan gambar 5 diatas menunjukkan tentang rasio belanja modal tahun anggaran 2018 – 2022 yang mengalami fluktuasi atau naik dan turun. Selama periode tersebut, secara keseluruhan proporsi belanja modal memiliki rata-rata sebesar 18% dari jumlah total belanja daerah. Capaian rasio belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan besaran Rp.1.189.300.902.085 atau 21% dari total belanja daerah pada periode tersebut dan capaian rasio belanja modal terendah terjadi pada tahun 2018 dengan besaran Rp.780.096.411.797 atau 16% dari total belanja daerah tahun anggaran tersebut.

**Tabel 7 Perhitungan Efisiensi Belanja Pemerintah Kota Bekasi**

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Efisiensi Belanja (%)
2018	5.745.961.495.721	5.000.442.687.914	87,03%
2019	7.004.094.885.460	5.566.376.729.279	79,47%
2020	5.757.432.487.561	4.785.811.812.190	83,12%
2021	6.449.614.890.862	5.704.885.462.982	88,45%
2022	6.673.930.904.273	5.718.816.481.557	85,69%
<b>Rata-rata</b>			<b>84,75%</b>

Sumber: LRA APBD Kota Bekasi (data diolah, 2023).

**Gambar 6 Perkembangan Efisiensi Belanja Pemerintah Kota Bekasi**

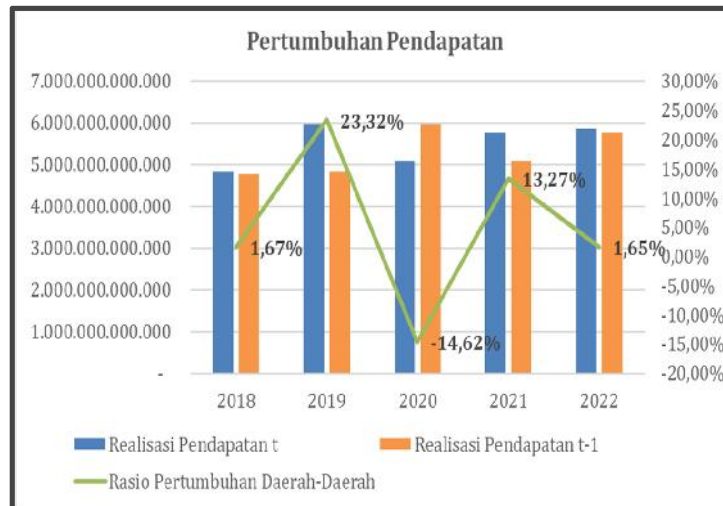
Sumber: LRA APBD Kota Bekasi (data diolah, 2023).

Tabel 7 dan gambar 6 diatas menguraikan besaran anggaran dan realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Bekasi tahun anggaran 2018 – 2022 serta capaian efisiensi belanja daerah yang ditunjukkan melalui persentase rasio. Selama 5 tahun anggaran tersebut capaian rasio efisiensi belanja mengalami fluktuasi dengan rata-rata efisiensi belanja daerah nilai rasio tersebut dibawah 100% atau sebesar 84,75% dari total belanja daerah. Capaian rasio efisiensi belanja atau anggaran belanja yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2019 sebesar 79,47% dan terealisasi Rp.5.566.376.729.279 dari alokasi anggaran sebesar Anggaran Realisasi Efisiensi Belanja Rp.7.004.094.885.460, dalam kata lain Pemerintah Kota Bekasi telah menghemat Rp.1.437.718.156.181 pada tahun anggaran 2019.

**Tabel 8 Pertumbuhan Pendapatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 - 2022**

Tahun	Realisasi Pendapatan t (Rp)	Realisasi Pendapatan t-1 (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah (%)
2018	4.835.980.257.174	4.756.703.208.558	79.277.048.616	1.67%
2019	5.963.932.792.508	4.835.980.257.174	1.127.952.535.334	23.32%
2020	5.092.165.753.501	5.963.932.792.508	-871.767.039.007	-14.62%
2021	5.767.654.700.558	5.092.165.753.501	675.488.947.057	13.27%
2022	5.862.702.649.409	5.767.654.700.558	95.047.948.851	1.65%

Sumber: LRA APBD Kota Bekasi (data diolah, 2023).

**Gambar 7 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kota Bekasi**

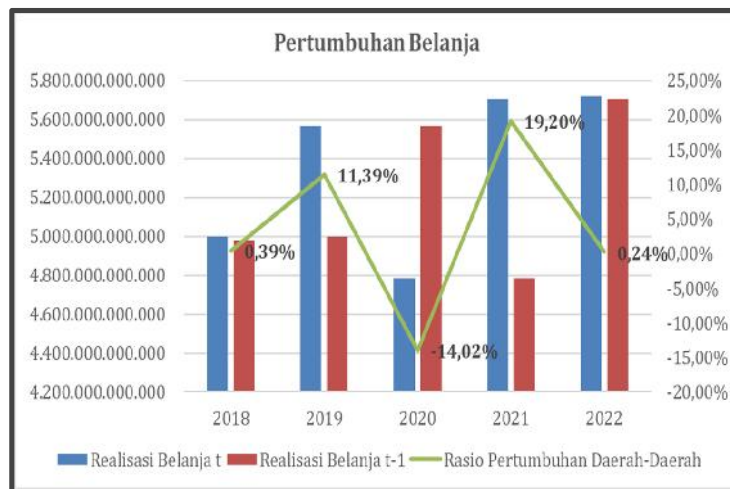
Sumber: LRA APBD Kota Bekasi (data diolah, 2023).

Berdasarkan Tabel 8 dan gambar 7 memberikan proyeksi mengenai realisasi TPD dan Capaian pertumbuhan TPD Pemerintah Kota Bekasi yang digambarkan melalui rasio pertumbuhan TPD yang fluktuatif selama tahun anggaran 2018 – 2022. Kota Bekasi pada komponen total pendapatannya masih banyak pendapatan daerah yang berasal dari dana bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam bentuk dana perimbangan dan transfer pemerintah provinsi. Besaran dana tersebut mencapai lebih dari 50% dari total pendapatan daerah dalam APBD. Secara umum kinerja realisasi pendapatan daerah Kota Bekasi menunjukkan nilai pertumbuhan yang meningkat.

**Tabel 9 Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Bekasi**

Tahun	Realisasi Belanja t (Rp)	Realisasi Belanja t-1 (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Rasio Pertumbuhan Daerah Daerah (%)
2018	5.000.442.687.914	4.981.195.360.624	19.247.327.290	0.39%
2019	5.566.376.729.279	5.000.442.687.914	565.934.041.365	11.32%
2020	4.785.811.812.190	5.566.376.729.279	-780.564.917.089	-14.02%
2021	5.704.885.462.982	4.785.811.812.190	919.073.650.792	19.20%
2022	5.718.816.481.557	5.704.885.462.982	13.931.018.575	0.24%

Sumber: LRA, (data diolah, 2023).



**Gambar 8 Rasio Pertumbuhan Total Belanja Daerah Kota Bekasi**

Sumber: Data diolah, 2023.

Berdasarkan data realisasi anggaran Kota Bekasi periode 2018 sampai dengan periode 2022, menunjukkan bahwa rata-rata menunjukkan tren realisasi yang fluktuasi, pertumbuhan total belanja daerah paling rendah yaitu pada tahun 2020 dengan nilai sebesar -14,02% Hal ini terjadi karena Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan anggaran tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan pertumbuhan belanja daerah realisasi sebesar 19,20% dan pertumbuhan yang positif.

## **Pembahasan**

### ***Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal***

Pada tabel 2 dan gambar 1 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi penurunan dan kenaikan. Penurunan PAD pada tahun 2020 dan peningkatan pada penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang menyebabkan rasio DDF Pemerintah Kota Bekasi mengalami fluktuasi. Penurunan rasio DDF pada Pemerintah Kota Bekasi sangat dipengaruhi oleh besaran PAD yang diukur kontribusinya terhadap TPD. Rata-rata kontribusi PAD terhadap TPD Kota Bekasi Periode tahun 2018–2022 sebesar 42,2% yang dimana kemampuan keuangan daerah nya masih sedang dan menunjukkan belum optimal terutama pada tahun 2020 yang menurun signifikan.

Keuangan Pemerintah Kota Bekasi tahun anggaran 2018 – 2022 masuk dalam kategori kemampuan keuangan daerah “sedang” yang dapat memberikan petunjuk atau indikasi bahwa pemerintah Kota Bekasi memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan desentralisasi yang masih perlu dioptimalkan, dikarenakan pemerintah pusat telah memberikan kewenangan serta tanggung jawab yang tinggi kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan penggalian dan mengelola sumber daya di daerah. Capaian desentralisasi fiskal secara langsung dipengaruhi oleh kemampuan pencapaian atau pemaksimalan penerimaan PAD. PAD Kota Bekasi masih berkontribusi kurang dari 50% dari TPD nya. Sehingga menurut kriteria yang disampaikan oleh (Mahmudi, 2019), kinerja pemerintah Kota Bekasi dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi fiskal belum optimal.

### ***Rasio Kemandirian Keuangan Daerah***

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 3 dan gambar 2 kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Bekasi pada tahun 2018 dengan rasio sebesar 76% dan pola hubungan Delegatif yaitu sudah baik, lalu pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan menjadi 73% dan 72% dari tahun anggaran sebelumnya dan tergolong pola hubungan Partisipatif yang dimana peran pemerintah pusat semakin menurun seiring dengan meningkatnya tingkat kemandirian daerah yang mendekati kemampuan dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan menjadi 84% dan 80% yang tergolong sudah mampu dan polanya termasuk pola hubungan Delegatif yang dimana tidak ada lagi campur tangan dari pemerintah pusat

karena daerah telah sepenuhnya mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Walaupun terjadi penurunan tahun 2019 dan pada tahun 2020 tetapi masih tergolong mampu dan pola hubungannya termasuk pola hubungan partisipatif. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 pemerintah Kota Bekasi mengalami penurunan pendapatan akibat realokasi anggaran yang menyebabkan dikeluarkannya kebijakan penurunan target pendapatan sebagai bentuk respons dari arahan pemerintah pusat dimana untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 sehingga Pemerintah Kota Bekasi juga turut mengeluarkan keputusan pemberian insentif yaitu stimulus ekonomi dalam bentuk penurunan hingga penangguhan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha mikro dan menengah untuk tujuan preventif terhadap pemutusan kerja massal juga terhambatnya aktivitas penyediaan jasa.

### ***Rasio Efektivitas PAD***

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4 dan gambar 3 dapat diketahui bahwa anggaran (PAD) Kota Bekasi selalu mengalami fluktuasi. Kota Bekasi pada tahun anggaran 2018 – 2022 secara keseluruhan menunjukkan fluktuasi dimana pada tahun 2019 mengalami penurunan, lalu pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan dan pada 2021 mengalami kenaikan kembali, secara angka efektivitas PAD Kota Bekasi sudah menunjukkan ketercapaian yang efektif karena mempunyai nilai 101,76%. Namun secara keseluruhan rata-rata Kota Bekasi belum menunjukkan ketercapaian yang efektif karena berada di bawah angka 100% atau dengan nilai 89,73%.

Ketercapaian efektivitas PAD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 – 2022 yang masih belum maksimal terjadi karena ketercapaian angka realisasi pada komponen PAD masih belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan pada awal penganggaran. Penyebab belum tercapainya target penetapan PAD terjadi karena belum maksimalnya tax effort yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam mendorong masyarakat baik perorangan atau badan dalam membayar pajak. Rasio efektivitas daerah di Kota Bekasi mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya perpajakan, salah satunya dengan tidak melaporkan jumlah pungutan pajak atas transaksi pada restoran, tempat hiburan, dan sebagainya dengan nilai sesungguhnya. Dengan demikian dapat



dikatakan bahwa secara rata-rata efektivitas PAD kota Bekasi selama tahun anggaran 2018 - 2022 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dengan rata-rata rasio sebesar 89.73%. Meskipun begitu, sesuai kriteria yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019), efektivitas PAD Pemerintah Kota Bekasi tahun anggaran tersebut masuk dalam golongan “Kurang Efektif” sehingga kinerja Pemerintah Kota Bekasi masih belum maksimal dalam melakukan realisasi pada sumber-sumber yang menjadi potensi penerimaan PAD.

#### ***Penyerapan Anggaran Belanja***

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan hasil penyerapan anggaran belanja subsidi, hibah dan belanja modal memiliki nilai yang fluktuasi, terdapat realisasi anggaran yang persentase penyerapan anggaran kurang dari 80% dan terdapat persentase realisasi anggaran 80% atau lebih dari anggaran yang dianggarkan tetapi secara keseluruhan memiliki porsi yang signifikan dalam total belanja. Pada penyerapan anggaran belanja bantuan sosial memiliki realisasi anggaran 80% atau dari yang dianggarkan maka diberi nilai 1 atau baik. Kemudian pada penyerapan anggaran belanja tak terduga terdapat fluktuasi yang signifikan dalam komponen ini, terutama pada tahun 2019 dan 2022 yang dimana persentase realisasi anggaran lebih rendah dari 80% dari anggaran yang dianggarkan dan memiliki nilai skor 0. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi tahun 2018 – 2022 terlihat fluktuasi dalam penyerapan anggaran belanja di Kota Bekasi selama beberapa tahun.

#### ***Rasio Kesperasian***

Tabel 6 dan gambar 4 menguraikan tentang rasio belanja modal tahun anggaran 2018 – 2022 yang mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Pada 5 tahun anggaran tersebut proporsi belanja operasionalnya tergolong masih besar atau berada diatas 50% dari total belanja daerah, dengan rata-rata 80%, hal tersebut memberikan informasi bahwa Pemerintah Kota Bekasi dalam mengalokasikan dana belanja daerahnya terhadap kegiatan operasional tergolong besar atau dapat dikatakan alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasi dengan fokus utama belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, penyebab selalu lebih besarnya belanja operasional dikarenakan pembayaran gaji pegawai, honorarium, dan pengadaan barang untuk keperluan kantor atau pengeluaran rutin yang bersifat jangka pendek dan untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan.

Tabel 7 dan gambar 5 diatas menunjukkan tentang rasio belanja modal tahun anggaran 2018 – 2022 yang mengalami fluktuasi atau naik dan turun. Dari penjelasan dan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi masih digunakan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Hal ini terbukti dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi lebih condong pada pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Masih belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kota Bekasi kecil atau belum terpenuhi. Oleh karena itu, kedepannya Pemerintah Kota Bekasi diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

#### ***Rasio Efisiensi Belanja Daerah***

Berdasarkan perhitungan pada tabel 8 dan gambar 6 menunjukkan bahwa tahun 2018-2022 capaian rasio efisiensi belanja mengalami fluktuasi dengan rata-rata efisiensi belanja daerah nilai rasio tersebut dibawah 100% atau sebesar 84,75% dari total belanja daerah. Secara rata-rata selama periode 2018 – 2022 Pemerintah Kota Bekasi selalu mengalokasikan belanjanya kurang dari 100%, menurut kriteria yang disampaikan oleh Mahmudi (2019), jika realisasi aktivitas belanja tidak melampaui pagu anggaran tertinggi yang telah ditetapkan pada saat proses penganggaran, dapat dikatakan pemerintah telah melakukan pengelolaan dana untuk pembiayaan aktivitas belanja yang baik atau efisien. Meskipun menurut kriteria kinerja efisiensi belanja Pemerintah Kota Bekasi efisien, setelah dilakukan analisis Pemerintah Kota Bekasi belum secara harfiah melakukan efisiensi karena penyerapan anggaran yang tidak melampaui alokasi anggaran bukan disebabkan oleh penghematan, melainkan oleh tidak terserapnya anggaran karena berbagai kegagalan dalam realisasi belanja terutama pada tahun 2020 yang terjadi pandemi covid-19.

### ***Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja***

Berdasarkan Tabel 9 dan gambar 7 memberikan proyeksi mengenai realisasi TPD dan Capaian pertumbuhan TPD Pemerintah Kota Bekasi yang digambarkan melalui rasio pertumbuhan TPD yang fluktuatif selama tahun anggaran 2018 – 2022. Pada tahun anggaran 2019 terjadi peningkatan sebesar 23,32% dari tahun anggarannya sebelumnya dan merupakan pertumbuhan pendapatan terbesar selama 5 tahun anggaran. Namun pada tahun anggaran 2020 besaran realisasi dan rasio pertumbuhan TPD mengalami koreksi yang cukup dalam sebesar -14,62% dari tahun anggaran sebelumnya. Realisasi TPD Pemerintah Kota Bekasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp.5.092.165.753.501 atau terjadi penurunan sebesar Rp.871.767.039.007.

Secara umum pertumbuhan TPD pemerintah Kota Bekasi dapat dikatakan berfluktuasi. Pada tahun 2019 mengalami realisasi TPD terbesar yaitu Rp.5.963.932.792.508 dan mengalami realisasi TPD terkecil pada tahun 2018 yaitu Rp.4.835.980.257.174. Secara lebih rinci pertumbuhan TPD tersaji pada gambar 4.11, dimana pertumbuhan TPD dari tahun anggaran 2018 – 2022 memiliki rata-rata pertumbuhan 5,058% dengan penurunan drastis terjadi pada tahun anggaran 2020. Meninjau rasio pertumbuhan TPD yang fluktuatif, hal tersebut memberikan tanda bahwa Pemerintah Kota Bekasi masih perlu untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendapatannya guna mempertahankan realisasi pendapatan secara maksimal.

Berdasarkan tabel 10 dan gambar 8 data realisasi anggaran Kota Bekasi periode 2018 sampai dengan periode 2022, pertumbuhan total belanja daerah menunjukkan bahwa rata-rata menunjukkan tren realisasi yang fluktuasi, paling rendah yaitu pada tahun 2020 dengan nilai sebesar -14,02% Hal ini terjadi karena Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan anggaran tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan pertumbuhan belanja daerah realisasi sebesar 19,20% dan pertumbuhan yang positif. Menurunnya jumlah anggaran tahun 2020 ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Kenaikan terbesar realisasi anggaran terjadi pada tahun 2021, dimana realisasi anggaran meningkat sebesar 19,20% yang didorong oleh kenaikan anggaran tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Kenaikan ini didorong oleh berangsur pulihnya perekonomian setelah Pemerintah mulai melonggarkan kegiatan pembatasan sosial sehingga perekonomian dapat berjalan dengan lebih baik dan mendorong kenaikan penerimaan pajak APBD Kota Bekasi. Selain itu,

realisasi anggaran juga mengalami kenaikan karena Pemerintah Kota Bekasi sudah kembali melakukan kegiatan yang direncanakan setelah di tahun 2020 banyak kegiatan yang dilakukan untuk penanganan Covid-19.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan teori dan data yang mengenai Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi maka dapat disimpulkan bahwa selama tahun anggaran 2018 – 2022, Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) termasuk kategori sedang sehingga kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih kurang, dan Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan rata-rata ketercapaian bahwa Pemerintah Kota Bekasi terhadap dana transfer pemerintah pusat masih lebih dominan daripada pendapatan asli daerah, dari keserasian belanja operasi dan belanja modal secara rata-rata masih mengalokasikan belanja daerahnya terhadap kegiatan operasional pemerintahan dibandingkan dengan belanja modal. Ketercapaian rasio efisiensi belanja secara rata-rata memiliki nilai 84,75%, namun efisiensi ini terjadi bukan karena adanya penghematan anggaran, melainkan karena adanya hambatan pada penyerapan anggaran belanja modal terkait pembangunan fasilitas publik yang menyebabkan penyerapan anggaran pada beberapa komponen belanja tidak terealisasi. Pemerintah Kota Bekasi masih mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif, hal ini berkaitan dengan kemampuan pengelola keuangan daerah yang belum maksimal dalam melakukan pelatihan dan pendidikan dalam perencanaan terhadap pengelolaan potensi pendapatan dan alokasi belanja yang dapat terukur secara akurat guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang optimal.

Adapun berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah dilakukan, Penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Bagi Pemerintah Kota Bekasi sebaiknya dapat meningkatkan realisasi belanja modal yaitu dalam hal penambahan aset sehingga dapat bermanfaat dan berguna di masa yang akan datang, untuk meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah, disarankan untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan identifikasi potensi wajib pajak dan wajib retribusi secara optimal. Selain itu karena masih banyaknya masyarakat yang tidak membayar pajak juga pemberian sosialisasi dan

edukasi dengan intensitas yang terbilang kurang intensif, sebaiknya Pemerintah melakukan sosialisasi yang persuasif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan media sosial sesering mungkin dengan konten-konten kreatif yang menarik, penuh edukasi, dan tujuan sosialisasinya tersasar dengan tepat pada segmen masyarakat tertentu yang memiliki potensi besar dalam melanggar pajak. Kemudian untuk akademisi yang ingin melakukan penelitian serupa agar menghasilkan hasil yang lebih komprehensif sebaiknya dapat menambahkan rasio-rasio dalam mengukur kinerja keuangan dan dapat menambah objek penelitian sehingga mendapatkan perbandingan kinerja keuangan antara Pemerintah Daerah.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim (2008). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Tlaga. In A. Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Tlaga. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim, M. I. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Keempat. In M. I. Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Darmawan, H. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Dini Andriyani, & Sri Wahyu Handayani. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(03), 53–63. <https://doi.org/10.56127/jukim.v1i03.106>.
- Hartoyo, H., & Arsad, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dompu). *Jurnal PenKomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.33627/pk.v4i1.437>
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Mardiasmo. (2006). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 14(1), 11–20. <https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84>
- Nur'aini. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Samarinda*. 1–23.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putra, Ferdian. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014). Universitas Negeri Padang.
- Pemerintah Kota Bekasi. (2021). *Sejarah Terbentuknya BPKAD Kota Bekasi*. BPKAD Kota Bekasi. <https://bpkad.bekasikota.go.id/pages/sejarah-terbentuknya-bpkad-kota-beksi>
- Winoto, A. H., & Falikhatun, F. (2015). Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menjelang Pemilu 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(1), 75–91. <https://doi.org/10.21002/jaki.2015.05>